RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BANJAR

I. KETERANGAN

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	13 November 2025
3.	Waktu	:	10:45 – 15:00 WITA
4.	Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Agus Maulana, SH.
6.	Plt. Sekretaris DPRD	:	Rahkmat Dhany, S.IP, M.AP, MIDS
7.	Kepala Bagian Persidangan & Perundang-undangan	:	Sri Rahayu, M.Ap
8.	Acara	:	Rapat Paripurna DPRD dengan acara:

1. Penyampaian Inisiator terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang :
    a) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa
    b) Toko Swalayan
    c) Pengembangan Ekonomi Kreatif
    d) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah
2. Penetapan Propemperda Tahun 2026
3. Perubahan Alat Kelengkapan DPRD
4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:
    a) Pengelolaan Sampah
    b) Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:
    a) Penyelenggaraan Perhubungan

b) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :
   a) Pengelolaan Sampah
   b) Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

9. Hadir : 27 Orang
10. Tidak hadir : 17 Orang

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WITA

Pimpinan Rapat :

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat :

- Bupati Banjar atau yang mewakili
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura),
- Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar ,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat berhadir pada Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini dibuka kami bacakan daftar hadir sebagai berikut : Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 44 orang, hadir sebanyak : 36 orang, tidak hadir sebanyak : 8 orang.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 127 Ayat (1) Huruf b bahwa Quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara:

1. Penyampaian Inisiator terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang :
    a) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa
    b) Toko Swalayan
    c) Pengembangan Ekonomi Kreatif
    d) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah
2. Penetapan Propemperda Tahun 2026
3. Perubahan Alat Kelengkapan DPRD
4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

a) Pengelolaan Sampah
b) Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:
   a) Penyelenggaraan Perhubungan
   b) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6) Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :
   a) Pengelolaan Sampah
   b) Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan bersama Penyampaian Inisiator terhadap Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa
2. Toko Swalayan
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah

Kepada juru bicara inisiator Komisi I kami persilahkan untuk menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, kepada juru bicara H. Sunardi dipersilakan.

Juru Bicara Insiator Komisi I:
Penyampaian Inisiator terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, tanggal 13 November 2025, disampaikan oleh H. Sunardi, DP, ST, MA.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Bupati Banjar atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar, Serta Rekan-rekan anggota DPRD, dan para Undangan yang kami hormati.
Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Banjar pagi ini.
Shalawat dan salam, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan Penyampaian Inisiator Terhadap Raperda Inisiatif Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini. Semoga dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhorrnat,
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, perlu diusulkan karena memiliki peran penting dalam mengatur, memperkuat, dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kebutuhan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Komisi I DPRD Kabupaten Banjar mengharapkan dengan usulan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa menjadi dasar hukum panting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, efektif, transparan, dan sesuai dengan karakteristik daerah. Tanpa Perda tersebut pelaksanaan UU Desa di daerah tidak optimal, bahkan menimbulkan ketidaksinkronan dalam kebijakan dan praktik pemerintahan desa.
Selain itu Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa diharapkan juga bisa Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemerintahan Desa dan Menyesuaikan dengan Dinamika dan Tantangan Baru.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang berbahagia,
Demikian Penyampaian Komisi I terhadap Usulan Raperda Inisiatif Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, semoga dapat dijadikan pertimbangan selanjutnya.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Waridho Wal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Amiruddin, S.H.I., M.H.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada Juru Bicara Inisiator Komisi I yang telah menyampaikan usulannya.
Selanjutnya kami persilahkan Juru Bicara Komisi II untuk menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD tentang Toko Swalayan dan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, kepada juru bicara Komisi II Rahmat Saleh, S.H.I. dipersilakan.

Juru Bicara Insiator Komisi II:
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Laporan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar tentang Penyampaian Komisi II terhadap Raperda Inisiatif DPRD, pada hari ini 13 November 2025 disampaikan oleh Rahmat Saleh, S.H.I.
Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Bupati Banjar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar, Serta Rekan-rekan Anggota DPRD, dan para Undangan yang kami hormati.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Banjar pagi ini.
Shalawat dan salam, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil Rapat Internal Komisi II tentang Penyampaian terhadap Raperda Inisiatif DPRD, melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini, semoga dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Rapat internal Komisi II telah dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjar, dari hasil rapat tersebut dapat kami sampaikan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Banjar mengusulkan 2 Raperda Inisiatif sebagai berikut:

1. Raperda Toko Swalayan, dibentuk dikarenakan perda ini bertujuan mengatur regulasi khusus yang mengatur tentang toko swalayan yang sudah banyak ada di kabupaten banjar, sehingga nantinya bisa menjadi landasan hukum bagaimana proses pendirian dari toko swalayan, kemudian dasar hukum dari pembentukan Perda ini adalah perpres 112 tahun 2007, PP No 29 Tahun 2021, Permendag Nomor 23 Tahun 2021, dan permendag No 18 Tahun 2022.
2. Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perda ini bertujuan untuk membuat landasan hukum mengenai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah Kabupaten Banjar dengan dasar hukum UU No 24 Tahun 2019.

Hadirin yang kami hormati, Demikian kesimpulan hasil pembahasan Rapat Internal Komisi II tentang Penyampaian Komisi II terhadap Raperda Inisiatif DPRD, semoga dapat dijadikan pertimbangan selanjutnya, dan kami berharap nantinya bisa dibahas bersama-sama apakah melalui Rapat Komisi atau Pansus yang kita sepakati bersama diruangan ini.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Waridho Wal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Lauhul Mahfudz, S.H. ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara Inisiator Komisi II yang telah menyampaikan usulannya.
Selanjutnya kami persilahkan Juru Bicara Komisi IV untuk menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah, kami persilakan kepada juru bicara M. Norhusain, S.Pd., S.H. dipersilakan.

Juru Bicara Insiator Komisi IV:
Bismillahirrohmanirrohim. Laporan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda Inisiatif tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan

Olah Raga Daerah, disampaikan pada hari ini 13 November 2025 oleh saya sendiri M. Norhusain.

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Bupati Banjar atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Banjar, Serta Rekan-rekan Anggota DPRD, dan para Undangan yang kami hormati.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan laporan hasil rapat kerja bersama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah.

Melalui Rapat Paripurna yang terhormat ini, kami berharap laporan ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhorrnat,

Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar telah melaksanakan rapat kerja bersama pihak eksekutif sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banjar.

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah.

   Raperda ini diusulkan karena Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Daerah. Namun Perda tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang kini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

   Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, diperlukan penyesuaian substansi dalam Peraturan Daerah agar selaras dengan ketentuan perundang- undangan terbaru.

   Melalui perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

   Perubahan ini juga diharapkan mampu mendorong pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi serta olahraga masyarakat di daerah secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Hadirin yang Kami Hormati,
Demikian kesimpulan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah. Semoga hasil pembahasan ini dapat dijadikan pertirnbangan dalam proses penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Waridho Wal lnayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Hj. Anna Rusiana, S.P. Ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada Juru Bicara Inisiator Komisi IV yang telah menyampaikan usulannya.
Apakah Rapat Paripurna DPRD Menyetujui untuk Dijadikan Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2026?

Rapat Paripurna DPRD:
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih atas Persetujuan Rapat Paripurna.
Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan membacakan Konsep Keputusan DPRD.

Sekretaris DPRD :
Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor : …. /DPRD/ KEP/2025 tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang diajukan oleh Komisi I, Komisi II dan Komisi IV untuk dijadikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat :dan seterusnya;
Memperhatikan :

1. Penyampaian Inisiator terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2026, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 13 November 2025;
2. Persetujuan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar secara lisan dalam Rapat Paripurna tanggal 13 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang diajuakan oleh Komisi I, Komisi II dan Komisi IV untuk dijadikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar.

Kesatu :
Menyetujui 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Toko Swalayan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah;

Yang diusulkan oleh Komisi I, Komisi II dan Komisi IV untuk dijadikan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2026.
Kedua :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua H. Agus Maulana (selesai)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD. Apakah Rapat Paripurna DPRD menyetujui Konsep Keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD:
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih atas Persetujuan Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Acara berikutnya adalah Persetujuan Penetapan Propemperda Tahun 2026. Kami persilahkan kepada Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan Rancangan Propemperda Tahun 2026. Kepada Juru Bicara H. Ahmad Fauzan, S.H.I. dipersilakan.

Juru Bicara BAPEMPERDA :
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar atau yang mewakili, Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Pj. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten Banjar, Para Direktur Perusahaan Daerah, Rumah Sakit Daerah, Seluruh Angggota DPRD Kabupaten Banjar, Undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Penyampaian Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026. disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Hari ini Kamis Tanggal: 13 Nopember 2026, dibacakan oleh saya sendiri H. Ahmad Fauzan

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berhadir untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara yang salah satunya adalah Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Banjar Tahun 2026.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,
Program pembentukan peraturan daerah (propemperda) adalah suatu instrumen perencanaan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, yang memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Propemperda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,
Untuk Propemperda Kabupaten Banjar Tahun 2026 ada 13 Raperda yang akan dimasukkan, yaitu terdiri dari:

1. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa Usulan dari DPRD Kabupaten Banjar.
2. Raperda Toko Swalayan Usulan dari DPRD Kabupaten Banjar.
3. Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Usulan dari DPRD Kabupaten Banjar.
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah Usulan dari DPRD Kabupaten Banjar.
5. Raperda Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Usulan dari Bupati Banjar.
6. Raperda Penambahan Penyertaan Modal Berupa BMD kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah Usulan dari Bupati Banjar.
7. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Usulan dari Bupati Banjar.
8. Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Usulan dari Bupati Banjar.
9. Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 Usulan dari Bupati Banjar.
10. Raperda Perubahan APBD TA 2026 Usulan dari Bupati Banjar.
11. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Usulan dari Bupati Banjar.
12. Raperda APBD TA 2027 Usulan dari Bupati Banjar.
13. Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Usulan dari Bupati Banjar.

Untuk Propemperda Tahun 2026 berjumlah 13 Raperda yaitu ada 4 Raperda yang berasal dari usulan DPRD Banjar dan ada 9 Raperda yang berasal dari Bupati Banjar.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Demikian penyampaian Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar tentang Penetapan Propemperda Kabupaten Banjar Tahun 2026. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan Wabillaahitaufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026. Apakah Rapat Paripurna

DPRD Menerima dan Menyetujui Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD:
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih atas Persetujuan Rapat Paripurna.
Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan membacakan Konsep Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2026.

Sekretaris DPRD :
Konsep Keputusan DPRD Kabupaten Banjar Nomor : …. /DPRD/KEP/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat :dan seterusnya;
Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 13 November 2025;
2. Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Banjar secara lisan dalam Rapat Paripurna tanggal 13 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026.
Kesatu :
Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Kedua :
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2026 dengan skala prioritas pembahasan;
Ketiga :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua H. Agus Maulana.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banjar, Nomor : …. /DPRD/KEP/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026.

Nomor Urut	Nama Raperda	Keterangan	
		Inisiatif Pengajuan	Waktu
1	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa.	DPRD Banjar	Triwulan I
2	Raperda Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.	Bupati Banjar	Triwulan I
3	Raperda Penambahan Penyertaan Modal Berupa BMD kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.	Bupati Banjar	Triwulan I
4	Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah.	DPRD Banjar	Triwulan II
5	Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar.	Bupati Banjar	Triwulan II
6	Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Bupati Banjar	Triwulan II
7	Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025.	Bupati Banjar	Triwulan II
8	Raperda Perubahan APBD TA 2026.	Bupati Banjar	Triwulan II
9	Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Bupati Banjar	Triwulan II
10	Raperda Toko Swalayan.	DPRD Banjar	Triwulan III
11	Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.	DPRD Banjar	Triwulan III
12	Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.	Bupati Banjar	Triwulan III
13	Raperda APBD TA 2027.	Bupati Banjar	Triwulan III

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua H. Agus Maulana (selesai).

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD. Apakah Rapat Paripurna DPRD menyetujui Konsep Keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD:
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih atas Persetujuan Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Acara selanjutnya adalah Perubahan Alat Kelengkapan DPRD, berdasarkan Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 021/FPPP-BANJAR/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 Perihal Usulan Perubahan Keanggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 58 Ayat (6) bahwa "Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Alat Kelengkapan Lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) Tahun berdasarkan Usul Fraksi.
Selanjutnya kami mintakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Konsep Keputusan DPRD.

Sekretaris DPRD :
Konsep Keputusan DPRD Kabupaten Banjar Nomor : …. /DPRD/KEP/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28/DPRD/KEP/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat :dan seterusnya;
Memperhatikan :

1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 021/FPPP-Banjar/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Perihal : Usulan Perubahan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28/DPRD/KEP/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar.
Kesatu :
Beberapa ketentuan Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28/DPRD/KEP/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar diubah di dalam Lampiran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
Kedua :
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjar, merangkap Anggota.

Ketiga :
Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah di pilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Keempat :
Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar, bukan anggota.

Kelima :
Tugas wewenang dan masa keanggotaan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.

Keenam :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 November 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua H. Agus Maulana.
Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banjar, Nomor : …. /DPRD/KEP/2025, tanggal 13 November 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28/DPRD/KEP/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar.

N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1. M. Zaini, M.Pd	KETUA	F PKB
2. H. Ahmad Fauzan, S.H.I	WAKIL KETUA	F GOLKAR
3. Lauhul Mahfudz, S.H		F NASDEM
4. Siti Noor Annisa		F NASDEM
5. Febrianor Rahman, S.H *		F PPP * menggantikan Fitriyah, S.Pd.I
6. Sayyid Abu Bakar Bahasyim		F BDS
7. Mulyadi, S.AP		F BDS
8. Kursani		F PAN
9. Muhammad		F GOLKAR
10. M. Ali Syahbana, S.Sos., M.H		F GERINDRA
11. Fariz Adam Ramadhan, S.Psi		F GERINDRA

Ket : Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Bapemperda bukan Anggota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua H. Agus Maulana (selesai).

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Konsep Keputusan DPRD, untuk mempertegas saya tanyakan kepada Rapat Paripurna DPRD. Apakah Rapat Paripurna DPRD menyetujui Konsep Keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD:
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih atas Persetujuan Rapat Paripurna.

Sekretaris DPRD :
Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang :

1) Persetujuan Terhadap 4 Raperda Inisiatif DPRD.
2) Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026
3) Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 28/DPRD/KEP/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjar

Kepada Pimpinan Rapat dan Bupati Banjar atau yang mewakili disilahkan menempati posisi yang telah ditentukan, Hadirin dimohon berdiri

--- : Penandatanganan Keputusan : ---

Kepada Pimpinan Rapat dan Bupati Banjar disilahkan kembali ke tempat semula, Hadirin disilahkan duduk kembali.

Pimpinan Rapat :
Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Marilah kita bersama - sama memperhatikan dan mendengarkan secara seksama Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang :

1) Pengelolaan Sampah
2) Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Dilanjutkan dengan Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :

1) Penyelenggaraan Perhubungan
2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kami Persilahkan Kepada Juru Bicara Dari Fraksi Untuk Menyampaikan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksinya, dimulai dari Fraksi Golkar disampaikan oleh H.Muhammad.

Fraksi Golkar :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Disampaikan Hari Kamis Tanggal 13 November 2025 Juru Bicara H.Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahiim. Yang terhormat Bupati Banjar atau yang mewakili, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Bagian dan seluruh Pejabat Pemkab Banjar, Direksi Perusahaan Daerah, Direktur RSUD dan undangan serta Hadirin yang berbahagia.
Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, selalu kita panjatkan karena kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menghadiri rapat Paripurna DPRD yang sesuai agenda saat ini yaitu penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Shalawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta penerus risalah beliau sejak dahulu, sekarang, hingga akhir zaman, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau. Amin ya rabbal alamin.
Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pemandangan Umum ini.

Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Persoalan sampah bukan hanya urusan kebersihan, tetapi juga menunjukkan budaya tertib dan tanggung jawab sosial masyarakat. Karena itu, Fraksi Golkar menilai Peraturan Daerah ini harus mendorong perubahan perilaku bersama. Pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar mencermati bahwa keberhasilan Peraturan Daerah ini bergantung pada kemampuan lembaga, konsistensi kebijakan, dan kerja sama semua pihak. Kebijakan yang menggunakan pendekatan ekonomi berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemberian penghargaan dan sanksi perlu didukung. Dengan cara ini, pengelolaan sampah bisa menjadi peluang ekonomi yang mendorong kemandirian daerah.
Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat. Fraksi Golkar berharap Raperda ini dapat menjadi langkah menuju Kabupaten Banjar yang bersih, tertata, dan berdaya saing tinggi.

Rapat Paripurna DPRD yang Kami Hormati,
Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah lama yang perlu penanganan serius. Dampak yang ditimbulkannya akan merugikan kesehatan masyarakat, melemahkan ekonomi lokal, dan mencoreng citra daerah. Fraksi Golkar menekankan pentingnya

pencegahan melalui deteksi dini, edukasi Masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.
Kami menilai penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem informasi bencana harus menjadi prioritas. Teknologi modern dapat mempercepat deteksi, memperluas pengawasan, dan meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran sesuai dengan semangat digitalisasi pemerintahan.
Peran masyarakat dalam menjaga dan mencegah kebakaran sangat penting. Masyarakat yang sadar dan aktif akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Fraksi Golkar berharap Raperda ini memberi perhatian pada pelestarian lingkungan untuk membangun Kabupaten Banjar yang tangguh, berdaya, dan beradab.

Rapat Paripurna DPRD yang Berbahagia,
Pada prinsipnya Fraksi Golkar dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk dapat dibahas pada tahapan tingkat selanjutnya.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, selalu kita panjatkan atas segala nikmat dan kuasa-Nya jualah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak Langkah beliau ilaa yaumil akhir.
Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda yang telah diagendakan pada hari ini.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,
Transportasi bukan sekadar urusan mobilitas, tetapi merupakan nadi yang menggerakkan perekonomian daerah. Implementasi Raperda ini tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik infrastruktur semata, tetapi juga memperhatikan tata kelola, keselamatan, dan konektivitas antarwilayah. Arah kebijakan perhubungan harus mampu memperkuat daya saing daerah dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat di pedesaan maupun kawasan potensial lainnya.
Fraksi Golkar memandang positif komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan. Namun demikian, kami menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan dukungan regulasi yang berpihak pada efisiensi, keselamatan pengguna jalan, serta pengawasan yang ketat terhadap operasional transportasi umum maupun kegiatan logistik. Dalam hal ini, sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan yang tertuang dalam Raperda ini.
Dengan memperhatikan urgensi dan substansi yang terkandung dalam Raperda ini, serta komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sistem perhubungan yang tertib, aman, dan modern, Fraksi Golkar mengharapkan agar pelaksanaannya benar-

benar menghadirkan kemudahan mobilitas, memperkuat konektivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjar secara merata.

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,
Penerapan sistem administrasi kependudukan berbasis digital perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta perlindungan data pribadi penduduk. Fraksi Golkar menegaskan agar aspek keamanan data menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, mengingat data kependudukan adalah aset strategis yang harus dijaga kerahasiaannya demi melindungi hak-hak warga negara.
Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diajukan Pemerintah Daerah merupakan upaya konkret untuk memperbaiki tata kelola kependudukan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kami menekankan agar pelaksanaan kebijakan ini benar-benar menghadirkan kemudahan nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar, termasuk di daerah terpencil yang aksesnya masih terbatas.
Fraksi Golkar berharap melalui kebijakan ini dapat membentuk inovasi pelayanan publik yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat serta dapat membawa manfaat bagi Masyarakat dalam memperkuat basis data Pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna Dewan yang Berbahagia,
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaniirrahiim. Fraksi Golkar dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Demikian Pendapat Akhir ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab Fraksi Golkar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar yang kita cintai. Semoga ikhtiar kita untuk membangun Kabupaten Banjar lebih Maju dan bermartabat di Ridhoi oleh Allah SWT. Wallahul muafiq ilaa aqwamitthariq. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Martapura, 13 November 2025, Fraksi Golkar Ketua H. Abdul Razak, S.IP., M.AP., sekretaris H. Ahmad Fauzan, S.H.I. ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi Golkar, Selanjutnya kepada Juru Bicara dari Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhirnya, dipersilakan kepada Fariz Adam Ramadhan, S.Psi.

Fraksi Gerindra :
Pandangan Umum Fraksi Gerindra Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dalam acara Penyampaian Bupati Banjar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kamis, 13 November 2025 disampaikan oleh Fariz Adam Ramadhan,S.Psi.

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Banjar atau yang mewakili, Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri

Martapura, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten dan Saudara-saudara Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Serta Hadirin Hadirat Yang Berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Pertama-tama Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, terlebih dahulu Marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Banjar hari ini dalam keadaaan sehat dan sejahtera.
Shalawat dan salam, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa persoalan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menimbulkan volume sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Di Kabupaten Banjar, persoalan sampah bukan hanya soal estetika lingkungan, tetapi sudah menyangkut kesehatan masyarakat, pencemaran air dan tanah, serta efektivitas layanan publik.
Dengan memperhatikan urgensi tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan:

1) Pemerintah Daerah perlu menegaskan prinsip pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali. Pendekatan kumpul-angkut-buang tidak lagi memadai untuk kondisi saat ini.
2) Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani persampahan, termasuk ketersediaan armada, peralatan, dan sarana pendukung lainnya.
3) Fraksi Gerindra menilai pentingnya pelibatan masyarakat, komunitas lingkungan, dan dunia usaha untuk mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan sampah. Edukasi dan sosialisasi harus menjadi program berkelanjutan.
4) Terkait retribusi persampahan, perlu diperhatikan asas keadilan, keterjangkauan, dan transparansi. Setiap rupiah yang dipungut harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas layanan.
5) Fraksi Gerindra meminta agar pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan teknologi dan metode yang ramah lingkungan. TPA tidak boleh menjadi sumber pencemaran atau menimbulkan konflik dengan warga sekitar.

6) Perlu adanya indikator kinerja yang jelas sehingga implementasi Raperda di masa mendatang dapat dievaluasi secara terukur.

Dengan demikian, Fraksi Gerindra menilai bahwa Raperda tentang Pengelolaan Sampah ini sangat penting guna memperkuat tata kelola lingkungan dan menjamin terselenggaranya pelayanan persampahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Rapat Paripuma Dewan Yang Terhormat,

Fraksi Gerindra memandang bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu ancaman serius bagi Kabupaten Banjar, mengingat karakteristik wilayah yang memiliki kawasan gambut serta aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan titik api. Dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat kegiatan ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup.

Dalam mempelajari Raperda ini, Fraksi Gerindra mengacu pada beberapa regulasi nasional, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang mengatur kebakaran hutan adalah Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Berdasarkan kajian tersebut, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1) Fraksi Gerindra menilai bahwa Raperda ini penting sebagai dasar penguatan sistem pencegahan karhutla, terutama pada aspek deteksi dini, patroli terpadu, serta kesiapsiagaan peralatan dan personel.
2) Pemerintah Daerah perlu memastikan koordinasi antar-instansi berjalan efektif, mulai dari BPBD, DLH, Dinas Kehutanan, aparat kecamatan, hingga pemerintah desa, sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan cepat dan terukur.
3) Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Desa-desa rawan karhutla perlu mendapatkan program pembinaan, pelatihan relawan, serta fasilitas pemadaman awal.
4) Pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan harus diperketat, disertai penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
5) Pemerintah Daerah perlu memiliki rencana mitigasi jangka panjang, termasuk menjaga kondisi lahan gambut agar tetap basah, penataan ruang berbasis risiko bencana, dan pemulihan ekosistem pasca kebakaran.

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Raperda ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana karhutla, mengingat intensitas kejadian yang berulang setiap tahun. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan Kabupaten Banjar mampu menghadapi ancaman karhutla secara lebih terstruktur, cepat, dan menyeluruh.

Dengan menyampaikan pandangan umum ini, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banjar berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan yang

komprehensif serta mempertimbangkan seluruh masukan yang kami sampaikan demi penyempumaan kedua Raperda tersebut.
Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Pendapat Akhir Fraksi Gerindra Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dalam acara Penyampaian Bupati Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan. Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Perhubungan tidak hanya menyangkut kelancaran lalu lintas, namun juga keselamatan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang jalan, terminal, angkutan umum, fasilitas penunjang transportasi, hingga manajemen rekayasa lalu lintas. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan menjadi penting mengingat kemajuan wilayah Kabupaten Banjar membutuhkan sistem transportasi yang tertata, aman, dan efisien.
Fraksi Partai Gerindra berharap Perda ini mampu menjadi dasar hukum yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang aman, tertib, teratur, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami berkomitmen mengawal implementasinya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Administrasi kependudukan adalah dasar dari berbagai kebijakan publik. Data yang akurat, mutakhir, dan terpadu adalah fondasi pembangunan daerah, terutama dalam perencanaan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan strategis lainnya.
Fraksi Gerindra memandang bahwa Raperda ini sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Berpedoman pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebut dan berdasarkan hasil bersama maka dengan Mengucapkan "Bissmillahirahmanirrahim" Fraksi Gerindra Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kami berharap Raperda ini dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Fraksi kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dalam proses pembahasan ini. Semoga dokumen yang telah disepakati ini dapat diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, atas kerja sama semua pihak dan perhatiannya kami ucapkan Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Hj. Helda Rina S.Agr, Sekretaris Rahmat Saleh, S.H.I.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi Gerindra, Selanjutnya kita persilakan kepada Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Siti Noor Anisa.

Fraksi Nasdem :
Pandangan Umum Fraksi Fraksi Nasdem terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang :

1. Pengelolaan Sampah
2. Sistem Penanggulan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Disampaikan oleh Siti Noor Anisa Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Pada Hari Kamis Tanggal 13 November 2025.

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Banjar atau yang mewakili, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, Seketaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, dan para Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,
Dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swr, atas Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya jualah pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri dan mengikuti jalannya kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Tidak lupa Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut- pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kaml hormati,
Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi Nasdem untuk menyampaikan Pemandangan Umum kami pada hari ini. lzinkan kami Fraksi Nasdem dalam kesempatan yang baik ini untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran sebagai berikut:

1. Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Fraksi

Nasdem menyambut baik dan pada prinsipnya menyetujui Ranperda ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Volume sampah harian yang tinggi telah menyebabkan tekanan besar terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) yang kapasitasnya semakin terbatas dan tidak lagi memadai jika tidak diiringi dengan perubahan sistemik dalam pengelolaan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 juga menjadi latar belakang Ranperda Pengelolaan sampah ini dibuat.

2. Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Fraksi Nasdem menyambut baik dan pada prinsipnya menyetujui ranperda ini untuk disahkan menjadi perda.Latar Belakang ranperda ini mencakup beberapa aspek, seperti kondisi geografis dan ekologis daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Sejarah kejadian kebakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Banjar. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Kebutuhan akan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi. Disamping itu Peraturan Daerah ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Nasdem yang dapat kami sampaikan, Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi Nasdem Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang:

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,
Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Fraksi Nasdem untuk menyampaikan Pendapat Akhir kami pada hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami memberikan tanggapan, masukan dan saran sebagai berikut:

1. Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan, Fraksi Nasdem pada prinsipnya menyetujui Ranperda ini untuk disahkan menjadi perda. Latar Belakang Ranperda ini Kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas Masyarakat, kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perhubungan yang aman, nyaman dan efisien. Tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan wilayah lain. Kondisi saat ini infrastruktur dan pelayanan transportasi di daerah masih belum optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan Program angkutan gratis agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi. Contoh Program angkutan pelajar gratis;
2. Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Fraksi Nasdem pada prinsipnya menyetujui Ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda Latar belakang ranperda ini kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data kependudukan.

Rapat Paripurna DPRD serta Hadirin yang kami hormati,
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Nasdem yang dapat kami sampaikan, Salah hilaf kami mohon maaf, atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terimakasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura, 13 November 2025, Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Derwana Farmei Golles J. N., S.AB., M.A., Sekretaris Siti Noor Annisa ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi Nasdem, Selanjutnya kita persilakan kepada Juru Bicara Fraksi PPP yang disampaikan oleh Ibu Fitriyah, S.Pd.I., dipersilakan.

Fraksi PPP :
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang:

1. Pengelolaan Sampah; dan
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Hari Kamis, 13 November 2025 Oleh Fitriyah, S.Pd.i.

Yang kami hormati Bupati Banjar atau yang mewakili, Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar, Sekretaris Dewan dan segenap jajarannya, Para Undangan dan rekan-rekan media masa, Serta hadirin hadirat yang berbahagia dan kami banggakan.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya jua kita masih dipanjangkan umur dan disehatkan badan sehingga dapat melaksanakan Rapat Paripurna pada hari ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada keharibaan junjungan dan panutan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluaga, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Beliau dari dulu, sekarang ila yaumil akhir.
Terlebih dulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang memberikan kesempatan dan waktunya untuk Fraksi kami menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang :

1. Pengelolaan Sampah; dan
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banjar atas disampaikannya Raperda tentang Pengelolaan sampah dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Melalui kesempatan ini, Fraksi kami memandang, bahwa Raperda tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan pembangunan berkelanjutan. Namun, sejak Perda Nomor 4 Tahun 2016 diberlakukan, persoalan seperti meningkatnya volume sampah dan terbatasnya fasilitas pengolahan masih belum tertangani optimal. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, penguatan kelembagaan, kejelasan kewenangan antar perangkat daerah, dukungan anggaran, serta pengawasan yang transparan. Penerapan ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan juga perlu disertai peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama lintas sektor agar pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Fraksi kami memandang kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas di Kabupaten Banjar. Lemahnya koordinasi, minimnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat membuat regulasi yang ada belum efektif. Karena itu, Raperda ini harus menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola penanggulangan karhutla secara sistemik, terukur, dan berbasis data, dengan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab lembaga, alokasi pembiayaan yang transparan, serta penerapan sanksi yang berkeadilan bagi pihak yang lalai.
Pada prinsipnya kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya kami sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang:
1. Penyelenggaraan Perhubungan; dan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Fraksi PPP mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai langkah penting dalam membangun sistem transportasi yang aman. tertib, dan berkelanjutan. Namun, kami menekankan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar menjawab persoalan nyata seperti keselamatan, pemerataan infrastruktur, serta penguatan transportasi publik yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Kabupaten Banjar.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Selanjutnya, berkenaan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Fraksi kami berpandangan bahwa, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti lemahnya infrastruktur digital dan terbatasnya kompetensi aparatur di tingkatdesa atau kelurahan. Karena itu, kami menegaskan agar Pemerintah Daerah tidak hanya memperluas akses layanan. tetapi juga memastikan adanya pengawasan, evaluasi berkala, serta peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Dengan adanya 2 Raperda ini, kami mengharapkan saran dan masukan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat dipertimbangkan dalam membuat kebijakan daerah agar berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat Kabupaten Banjar.
Oleh karena itu, Fraksi kami mengapresiasi Raperda ini dan menerima Raperda ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang Terhormat,
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi kami terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Perhubungan; dan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Apabila ada hal yg kurang berkenan kami mohon maaf dan atas perhatian semua pihak kami ucapakan terima kasih. Wallohul Muaffiq Ila Aqwamiththoriq. Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Amiruddin, S.H.I., M.H., ditandatangani, Sekretaris Febrianor Rahman, S.H., ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi PPP, sebelum saya melanjutkan saya mohon rekan-rekan untuk mempersingkat waktu karena ada 3 Fraksi lagi, langsung ke intinya saja ,karena nanti ada jawaban bupati supaya tidak terlalu Panjang, sepakat ya? Selanjutnya kita persilakan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dipersilakan.

Fraksi Partai kebangkitan Bangsa:
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Banjar Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Yang kami hormati Bupati Banjar atau yang mewakili, Wakil Ketua beserta rekan-rekan anggota DPRD Kab. Banjar, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Sekretaris Daerah, stat Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Serta Rekan Media dan hadirin hadirat yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dalam keadaan sehat wala'fiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, yang merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta kelestarian alam Kabupaten Banjar.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Fraksi PKB memandang bahwa pengelolaan sampah merupakan persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat menimbulkan volume sampah yang semakin besar, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Untuk itu, Fraksi PKB menilai penting adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai Pengurangan, pemilahan, dan penanganan sampah dari sumbernya, Penguatan peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sampah, Dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai serta Penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Fraksi PKB menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman serius bagi ekosistem, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah. Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang rawan karhutla, terutama di lahan gambut. Oleh karena itu, keberadaan Raperda ini sangat penting untuk memperkuat sistem penanggulangan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Fraksi PKB mendorong agar dalam penyusunan Raperda ini memperhatikan Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dan dunia usaha, Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan serta pemadaman, Penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan tanggap darurat, Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan secara tegas dan konsisten. Selain itu, Fraksi PKB berharap agar penanggulangan karhutla tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi bencana, tetapi juga proaktif dan preventif, dengan edukasi serta insentif bagi masyarakat yang menjaga dan memelihara lingkungan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kami berharap agar Raperda ini dapat dibahas lebih lanjut secara komprehensif, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Banjar Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Penyelenggaraan Perhubungan ;
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,
Fraksi PKB menilai bahwa sektor perhubungan merupakan urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa yang berperan penting dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah melalui Perda ini dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta memperkuat pengawasan terhadap angkutan umum, terminal, parkir, dan sarana transportasi pedesaan. Kami berharap Perda ini nantinya mampu menciptakan sistem transportasi daerah yang terpadu, ramah lingkungan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Fraksi PKB menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kami memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akselerasi pelayanan dokumen kependudukan secara digital dan gratis, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kami berharap agar pelaksanaan Perda ini dapat memastikan setiap penduduk memiliki identitas yang sah, memperkuat database kependudukan, serta menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang; Penyelenggaraan Perhubungan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Atas segala perhatian yang diberikan kami ucapkan banyak terima kasih. Mohan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhoannya untuk kita semua. Amin
Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Martapura, 13 November 2025 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Banjar, Ketua M. Zaini, M.Pd., ditandatangani, Sekretaris H. Wahyudin, S.H. ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sekali lagi nanti untuk fraksi PAN tidak usah pakai yang terhormat langsung saja ke intinya. Oke kita persilakan kepada Juru Bicara Fraksi PAN yang disampaikan oleh Akhmad Riduan, S.M.

Fraksi PAN :
Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pangelolaan Sampah .dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pendapat Akhir tentang Perhubungan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar Hari Kamis, 13 November 2025 Oleh Akhmad Riduan, S.M.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Banjar, Bupati dan Wakil Bupati Beserta Jajarannya, Sekretaris Daerah, Stat Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Forum Komonikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Sidang Dewan yang terhormat Hadirin yang berbahagia,
Sebelum Fraksi kami menyampaikan Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi, perkenakan kami untuk menyampaikan rasa Syukur kehadirat Allah Subhanahu

wataala atas limpahan rahmat taufiq dan hidayahnya,sehingga kita semua pada hari ini dapat berhadir dan mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walanat, semoga kehadiran kita semua menjadi amal ibadah dan akan dilipat gandakan.
Sholawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya sejak dulu sekarang hingga yaumil qiyamah.

Sidang Dewan yang terhormat Hadirin yang berbahagia,
Di kesempatan yang baik ini terlebih dulu Fraksi PAN menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Sistem Penanggulangan Bencana kebakaran Hutan dan Lahan serta Pendapat Akhir Fraksi terhadap dua Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Perhubungan.
Sampah dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan , dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Dua Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Perhubungan.
Ucapan terima kasih dan apresiasi tak lupa fraksi PAN sampaikan kepada Bupati beserta jajarannya yang telah menyampaikan draf terhadap kedua Raperda tersebut dan telah memberikan tanggapan dan jawawban atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang didalamnya memuat pendapat, saran sarta masukan terhadap raperda-raperda yang telah dibahas pada Sidang Paripurna sebelumnya.
Terkait Raperda Pengelolaan Sampah dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Fraksi kami menekankan pentingnya kesiapan Pamerintah Daerah melalui OPD yang terkait untuk pengelolaan sampah tersebut baik dari sektor hulu sampai sektor hilirnya ,sehingga handaknya dikelola dengan baik bahkan jangan sampai pada hal itu saja, kalau bisa sampai mendatangkan nilai ekonomi juga pada sektor sampah tertsebut. Sehingga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tambahan daerah, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan pada skala masyarakat. Untuk itu Fraksi PAN siap untuk membahas Raperda yang diajukan Pamerintah Daerah bersama kolega Dewan lainnya.
Terkait Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang diusulkan pemerintah daerah sangat perlu untuk ditindak lanjuti dengan melakukan pembahasan pengkajian yan mendalam sehingga dapat menghasilkan peraturan sebagai mana yang diharapkan.
Peran pamerintah daerah sangat penting dalam upaya pencegahan bahaya melalui edukasi terhadap masyarakat, demikian juga dalam penanggulangan jika terjadi kebakaran harus dilakukan dengan cepat tepat dan terukur, kesiap siagaan dan kecepatan dalam memadamkan kebakaran akan dapat menyelamatkan harta benda bahkan mencegah korban jiwa.
Fraksi kami mengusulkan perlu adanya pedoman dalam menjalankan kebijakan, Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terkait dengan standar yang seharusnya dilengkapi oleh pemilik, pengguna maupun pengellola, selain itu perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat terhadap kedua Raperda ini, yang harus dilakukan program program edukasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan organisasi Masyarakat perlu di tingkatkan.

Sidang Paripurna yang Terhormat,
Adapun terhadap pendapat akhir Fraksi PAN DPRD Kabupaten Banjar atas dua Raperda yaitu :

1. Penyelenggaraan Perhubungan, dan;
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Setelah mendengarkan dan membaca atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bupati Banjar terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi pada sidang sebelumnya, masukan pendapat dan saran dari anggota Fraksi yang telah melakukan pembahasan di komisi-komisi terkait dengan kedua Raperda ini maka dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wataala diawali dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Fraksi PAN DPRD Kabupaten Banjar dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ini menyetujui dan menerima kedua Raperda tersebut agar selajutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Akhirnya atas nama segenap anggota Fraksi PAN DPRD Kabupater Banjar menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya.

Sidang Dewan Yang Terhormat Hadirin Yang Berbahagia,
Demikianlah Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda kami sampaikan, yang untuk selanjutnya menunggu jawaban pamerintah daerah untuk dilakukan pembahasan lanjutan, atas kedua Raperda tersebut, sungguh merupakan Upaya yang dilandasi oleh niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan belanja daerah bisa menjadi tepat sasaran dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional. Semoga apa yang kita lakukuan ini akan memberikan kebaikan untuk Masyarakat dan untuk kemajuan Kabupatan Banjar dimasa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. allahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Kamis 13, November 2026 Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD kabupaten Banjar Ketua Kursani, Sekretaris Akhmad Riduan, S.M., ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi PAN, selanjutnya kita persilakan kepada Juru Bicara Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Bahasyim, dipersilakan.

Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera :
Bismillahirrohmanirrohim, Pandangan Umum Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera DPRD Kabupaten Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Sampah; dan
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, hari Kamis, 13 November 2025, Oleh Sayyid Abu Bakar Bahasyim.
Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Bupati dan Wakil Bupati Banjar beserta jajarannya, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten Dan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Mari kita panjatkan segala puji kehadirat Allah SWT, yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat melaksanakan amanah dengan baik sampai hari ini. sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia, nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabat dan umat penerusnya hlngga hari akhlr.
pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampalkan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami lewat mimbar ini untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera terhadap Raperda Pengelolaan Sampah dan Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Hadirin rapat paripurna DPRD yang berbahagia,
Fraksi kami menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kedua Rancangan Peraturan Daerah ini, yang mengangkat isu strategis bagi keberlangsungan lingkungan dan kesetamatan masyarakat. Kedua Raperda ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan antisipatif. Kami meyakini bahwa pengelolaan sampah dan penanggulangan Karhutla adalah dua sisi mata uang yang sama dalam membangun ketahanan ekologis daerah, sehingga memerlukan kerangka hukum yang komprehensif dan visioner.
Secara khusus, untuk Raperda Pengelolaan Sampah, fraksi kami mendorong sebuah perubahan paradigma dari pendekatan "kumpul-angkut-buang" menuju ekonomi sirkular yang berprinsip pada Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Dukungan kami tertumpu pada pentingnya pengaturan yang jelas mengenai pemberdayaan bank sampah, dan integrasi para pemulung ke dalam sistem formal. Hal ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi tentang menciptakan lapangan kerja baru dan keadilan sosial, di mana sampah dikelola sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Sementara itu, mengenai Raperda Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, fraksi kami menekankan bahwa pencegahan harus menjadi pilar utama, didukung oleh sistem deteksi dini yang modern dan koordinasi antar instansi yang solid. Kami menghimbau agar sistem ini mampu memperkuat penegakan hukum terhadap pembakar lahan illegal memberdayakan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan memastikan rehabilitasi lahan gambut. Pendekatan reaktif pemadaman saja tidak lagi memadai, yang dibutuhkan adalah strategi pro-aktif yang mencegah api sebelum menyala.
Pada akhirnya, dukungan fraksi kami terhadap kedua Raperda ini bersifat kondisional, dengan harapan agar aspek pencegahan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat dalam pembahasan lebih lanjut. Kami bertekad untuk bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyempurnakan dan mengesahkan kedua regulasi penting ini, harapan kami ini menjadi instrumen nyata yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat di daerah kita.
Rapat parlpurna DPRD yang terhormat, hadlrln yang berbahagia,
Demikianlah pandangan umum yang dapat Fraksi kami sampaikan, selanjutnya Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera menyetujui akan rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kemudian. Pendapat Akhir Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera DPRD Kabupaten Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami lewat mimbar lni untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera terhadap 2 (dua) Raperda, yaltu.

1. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan; dan
2. Raperda Penyelenggaraan Admlnistrasi Kependudukan.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang berbahagia,
Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesepahaman Pemerintah Kabupaten terhadap pandangan fraksi kami serta komitmen yang tertuang dalam penyusunan Raperda tersebut, yang mana pada pain integrasi multi-moda transportasi yang adaptif dan berkelanjutan sebagai solusi atas tantangan geografis daerah. Untuk memastikan rancangan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektlf, fraksi kami mendorong agar Pemerintah segera menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta skema pendanaan yang terperinci, sehingga integrasi transportasi darat, sungai, dan udara tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi benar-benar dapat mewujudkan konektivitas yang merata dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Banjar secara nyata.
Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera menyambut baik dan mendukung penuh komitmen Pemerintah Daerah untuk memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan secara online serta mendekatkannya melalui desa dan kelurahan, yang disertai dengan langkah sosialisasi yang masif malalui barbagai saluran. Kami mendorong agar komitmen strategis ini segera terwujud secara nyata dengan memastikan kesiapan infrastruktur teknologi dan Jaringan internet yang merata, memberikan pelatihan yang memadai bagi aparatur, dan menyediakan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, sehingga tujuan mulia untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dapat benar-benar terwujud dengan baik.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia
Demikianlah pendapat akhir yang dapat Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera sampaikan, selanjutnya Fraksi kami menyetujui akan Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT. Selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Martapura, 22 Jumadil Awal 1447/ 13 November 2025 M Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Sayyid Abu Bakar Bahasyim, Sekretaris Mulyadi, S.AP. Ditandatangani.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih Kepada Juru Bicara dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

1. Penyelenggaraan Perhubungan
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kita telah memperhatikan dan mendengarkan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar tadi dimana pada prinsipnya Fraksi-Fraksi DPRD menerima untuk dibicarakan pada Tahap Pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bupati Banjar untuk menyiapkan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Maka rapat kami skors selama 10 Menit.

----- :SKORS: -----

Pimpinan Rapat :
Rapat Paripurna dibuka kembali.

Rapat paripurna DPRD yang terhormat,
Selanjutnya marilah kita mendengarkan dan memperhatikan Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kepada yang terhormat Bupati Banjar atau yang mewakili dipersilahkan.

Bupati Banjar :
Bismillahirrohmanirrohim. Izin pimpinan untuk menyampaikan Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, yang kami hormatiKetua, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Banjar; Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar; Ketua Pengadilan Negeri Martapura; Sekretaris Daerah, Stat Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; Serta hadirin yang berbahagia.
Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat. karunia dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD dalam acara Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu :

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dengan diagendakannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban ataupun tanggapan terhadap Pemandangan Umum yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD dan tanpa mengurangi rasa hormat ada beberapa jawaban/tanggapan terhadap pemandangan umum yang kami jawab hanya di salah satu Fraksi untuk efisiensi penyampaian jawaban ini. Secara berurutan kami sampaikan, sebagai berikut:

I. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

Kami menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar yang telah menerima dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dibahas pada tahapan tingkat selanjutnya.

Terkait Raperda Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyambut baik pandangan Fraksi Golkar bahwa Peraturan Daerah ini harus menjadi tonggak perubahan perilaku kolektif dan bukan sekedar penambahan aturan. Kami sepakat bahwa pengelolaan sampah harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Raperda ini dirancang untuk mendorong pendekatan ekonomi sirkular, serta penerapan insentif dan disinsentif agar pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang ekonomi baru.

Kami mengapresiasi dan menghargai atas perhatian dan kepedulian Fraksi Partai Golkar terhadap isu kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi persoalan klasik dengan dampak yang merugikan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan citra daerah. Pandangan yang menekankan pentingnya pencegahan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan merupakan masukan yang berharga bagi kami.

Kami menyambut baik saran mengenai perlunya sistem deteksi dini, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Setiap masukan dari Fraksi Partai Golkar akan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan Raperda ini lebih lanjut.

II. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

Pemerintah Kabupaten Banjar kami menyampaikan penghargaan yang tulus atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Kami sependapat bahwa persoalan sampah semakin kompleks dan pendekatan "kumpul-angkut-buang" tidak lagi memadai. Raperda ini secara tegas mengatur prinsip pengurangan dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur, serta memastikan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan dengan metode ramah lingkungan. Kami juga akan memastikan bahwa mekanisme retribusi persampahan dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan dan transparansi.

Kami memiliki persepsi yang sama mengenai kebakaran hutan dan lahan sebagai ancaman serius multidimensi yang mengancam ekologi, kesehatan, dan

perekonomian daerah. Penekanan pada pentingnya penguatan sistem pencegahan yang mencakup aspek deteksi dini, patroli terpadu, dan kesiapsiagaan peralatan, sejalan sepenuhnya dengan arah kebijakan yang kami rancang. Kami meyakini bahwa investasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan akan memberikan dampak yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan hanya berfokus pada penanggulangan saat kebakaran terjadi.

Kami mengapresiasi penekanan Fraksi Gerindra pada aspek koordinasi dan kolaborasi. Komitmen untuk memastikan koordinasi yang efektif antar-instansi, dari Sadan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, hingga Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, telah dan akan terus menjadi prioritas dalam implementasi nanti. Poin strategis lainnya yang kami catat baik adalah dorongan untuk pelibatan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pemerintah Daerah melihat komunitas sebagai ujung tombak sekaligus mitra utama. Program pembinaan desa, pelatihan relawan, dan fasilitasi peralatan pemadaman awal akan diintegrasikan dalam strategi penanggulangan. Di sisi lain, pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembakaran, tanpa pandang bulu, merupakan wujud komitmen kami menciptakan efek jera dan kepastian hukum.

Terakhir, kami menyampaikan terimkasih untuk pandangan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Gagasan mengenai mitigasi jangka panjang, seperti menjaga kelembaban lahan gambut, penataan ruang berbasis risiko, dan pemulihan ekosistem, menunjukkan kematangan berpikir bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak boleh reaktif, tetapi harus menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

III. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Nasdem yang pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Terkait Raperda Pengelolaan Sampah, kami sependapat dengan pandangan Fraksi Nasdem mengenai urgensi perubahan sistemik. Kami menyadari bahwa volume sampah harian yang tinggi telah memberi tekanan besar pada TPA yang kapasitasnya semakin terbatas. Raperda ini memang disusun untuk mengatasi hal tersebut, sekaligus untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Kami menyambut baik penyambutan positif dari Fraksi Nasdem dan menghargai kesamaan persepsi akan urgensi dari Raperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ini. Sejalan dengan pandangan Fraksi Nasdem, kami pun menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Daerah yang lama sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan, tuntutan, serta kebutuhan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pencabutan dan penggantian dengan regulasi yang baru, yang lebih efektif dan terintegrasi, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda.

Dukungan Fraksi Nasdem untuk mengesahkan Ranperda ini menjadi Perda merupakan motivasi bagi kami. Atas dukungan ini, kami mengucapkan terima

kasih dan menyampaikan komitmen serta kesiapan Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dalam proses pembahasan lebih lanjut guna menyempurnakan dan mewujudkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

IV. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Kami menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menerima dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Mengenai Raperda tentang Pengelolaan Sampah, kami mengapresiasi catatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum optimal dalam menangani peningkatan volume sampah dan keterbatasan fasilitas. Raperda ini merupakan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kami berkomitmen untuk memastikan adanya kejelasan pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan transparan, yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kami menghargai pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius dengan dampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Pencermatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa regulasi yang ada selama ini belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami.

Kami juga menyambut baik penekanan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai pentingnya pengaturan tanggung jawab lembaga, alokasi pembiayaan yang transparan, dan penerapan sanksi yang berkeadilan bagi pelaku kelalaian. Bahwa Raperda ini harus menjadi tonggak perubahan nyata, bukan sekadar penyesuaian terhadap peraturan tingkat atas, dan harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penanggulangan secara sistemik, terukur, dan berbasis data, akan menjadi bahan pertimbangan panting dalam pembahasan selanjutnya.

V. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Terima kasih atas apresiasi dan pandangan komprehensif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terkait Raperda Pengelolaan Sampah, kami menyambut baik masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Raperda ini memang dirancang untuk mengatur secara komprehensif pengurangan, pemilahan, dan penanganan sampah dari sumbernya, serta penguatan peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Pemerintah Daerah juga akan fokus pada pemenuhan dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, disertai penerapan sanksi untuk menjamin kepatuhan.

Kami menyadari bahwa Kabupaten Banjar masuk dalam kategori wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan lahan gambut, sehingga keberadaan Raperda ini memang sangat penting. Kami menyambut baik

dorongan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar sistem penanggulangan bersifat terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sarana dan prasarana pencegahan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam deteksi dini dan tanggap darurat.

Kami juga mengapresiasi penekanan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar penanggulangan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif, dengan edukasi dan insentif bagi masyarakat yang turut menjaga lingkungan. Atas dukungan ini, kami mengucapkan terima kasih dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam menyempurnakan regulasi ini.

VI. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Kami berterima kasih atas pandangan dan kesiapan Fraksi Partai Amanat Nasional untuk membahas 2 (dua) Raperda ini lebih lanjut. Terhadap Raperda Pengelolaan Sampah, kami mencatat penekanan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai kesiapan Perangkat Daerah terkait untuk mengelola sampah dari sektor hulu sampai sektor hilir. Raperda ini disusun sebagai landasan hukum untuk membangun sistem tersebut secara terintegrasi. Kami juga optimis, sejalan dengan pandangan Fraksi PAN, bahwa pengelolaan yang baik dapat mendatangkan nilai ekonomi dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru serta membuka lapangan pekerjaan.

Kami juga sepenuhnya sependapat bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memerlukan pendekatan yang terpadu dan melibatkan seluruh elemen stakeholders. Masukan Fraksi PAN mengenai pentingnya koordinasi dan kesiapan institusi kami terima dengan baik, dan akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pembahasan Raperda ini.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami menyambut baik niat tulus Fraksi PAN untuk bersama-sama memperbaiki penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan siap melanjutkan pembahasan 2 (dua) Raperda ini secara terbuka, bijaksana, dan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Banjar secara luas.

VII. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG DEMOKRAT SEJAHTERA

Kami berterima kasih atas komitmen penuh dan pandangan dari Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera yang menyetujui kedua Raperda ini untuk ditindaklanjuti ke tahapan pembahasan. Terkait Raperda Pengelolaan Sampah, kami sangat sependapat dengan dorongan Fraksi untuk mengubah paradigma dari pendekatan "kumpul-angkut-buang" menuju ekonomi sirkular yang berprinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat pengaturan mengenai pemberdayaan bank sampah dan mengintegrasikan para pemulung ke dalam sistem formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera bahwa sampah dapat dikelola sebagai sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan keadilan sosial.

Kami menghargai komitmen penuh Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera untuk mendukung Raperda ini sebagai isu strategis bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Penekanan Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera bahwa pencegahan harus menjadi pilar utama, didukung oleh sistem deteksi dini

yang modem dan koordinasi antar-instansi yang solid, merupakan pandangan yang sangat kami hargai.

Kami juga menyambut baik dukungan terhadap pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), penegakan hukum terhadap pembakar lahan ilegal, dan rehabilitasi lahan gambut. Pandangan bahwa pendekatan reaktif saja tidak lagi memadai dan dibutuhkan strategi proaktif untuk mencegah kebakaran sebelum terjadi akan menjadi bahan pertimbangan kami.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Demikianlah penyampaian jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Raperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Sekali lagi kami menyampaikan ucapkan terima kasih atas terselenggaranya agenda Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dan selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya, sehingga penyelesaian pembentukan Raperda ini dapat sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Semoga segala upaya kita untuk kemajuan daerah dan mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis mendapat kemudahan dan ridho dari Allah SWT. Atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muafiq ilaa aqwamitthariq. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, S.I.Kom.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada Bupati Banjar atau yang mewakili yang telah menyampaikan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kami harapkan Jawaban dan Penyampaian Bupati Banjar tadi dapat dijadikan bahan pembahasan selanjutnya.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat
Marilah kita berdo'a bersama kehadirat Allah SWT. Semoga kita diberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan kita semua. Untuk memimpin do'a kami mintakan kepada yang terhormat Guru Fauzan dipersilakan.

H. Ahmad Fauzan, S.H.I.:

(Membacakan Do’a)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada yang terhormat Guru Fauzan semoga do’a dan harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.
Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini ditutup, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bupati Banjar atau yang mewakili

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura),
- Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berhadir,

Kami mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati para hadirin.

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Hari Kamis, Tanggal 13 November 2025, kami nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WITA

Martapura, 13 November 2025

Pimpinan Rapat,

H. Agus Maulana, SH.